

# “Ngeunah Eon Teu Ngeunah Ehe”:

## Wajah Wakil Rakyat Kita

Oleh: Dede Kosasih\*

Ketika membaca judul di atas, bagi kebanyakan orang yang paham akan idiom Sunda, tentu akan mengernyitkan dahi. Pertama, mungkin dipicu oleh ketidak-laziman pemakaian idiom itu dalam penggunaan keseharian di masyarakat. Karena dalam masyarakat Sunda umumnya lebih familiar dan lebih mengenal ungkapan “*ngeunah Ehe teu ngeunah Eon*”. tinimbang “*ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*”.

Awalnya penulis pun sempat bingung dan ragu menyikapi keduanya. Namun kebingungan itu pupus sudah manakala membuka *Kamus Basa Sunda* (cetakan baru) karya *masterpeace* Ama Satja (R. Satjadibrata) (Kiblat Buku Utama, 2005: 119). Dalam kamus itu ditemukan *entry* (lema) *Éon* dan *entry reog* (pelengkap keterangan Eon). Dengan gamblang dinyatakan bahwa *Éon* itu sebenarnya adalah seorang *bodor sohor* (pelawak) reog. Nama yang melekat pada suatu perkumpulan reog, biasanya berdasarkan siapa *lulugu bodorna* (yang terkocak). Umpamanya, di Sumedang dikenal dengan reog *Si Kewuk*, di Bandung; reog *Si Eon*; dan di Sukabumi: reog *Menir*. Karena saking lucunya, *Éon* dalam perannya pada waktu manggung, digambarkan sebagai orang yang suka ‘licik’. Kelicikannya itu tercermin dari “bobodorannya” ketika main *dodomba*, dengan lawan mainnya yang bernama Ehe. “*Hé (Éhe), lamun domba Éon meunang, Eon kudu digandong ku Ehe. Tapi lamun domba Eon eleh, Ehe kudu ngagandong Eon.*” (Hé (Ehe), jika domba Eon menang, Eon harus digandong oleh Ehe. Tapi bila domba Eon kalah, Ehe harus menggandong Eon). Jadi itulah kira-kira awal munculnya babasan (idiom): *Ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*.

Terus terang dalam menyikapi fenomena perkembangan idiom (Sunda) itu penulis sempat heran. Karena sebelumnya penulis sangat meyakini (dan sependapat dengan pernyataan Ajip Rosidi dalam bukunya **Babasan & Paribasa**, 2005) keterangan (dari guru maupun buku) bahwa ungkapan (idiom) itu adalah kalimat yang sudah baku (*matok*), tidak bisa dirobah (susunannya) atau diperhalus kata-katanya. Namun bila mengacu pada keterangan dari Kamus Basa Sunda itu, ternyata yang benar adalah “*ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*”. Walaupun idiom yang berkembang dan mengakar justru ungkapan *ngeunah Ehe teu ngeunah Eon*.

Boleh jadi fenomena ini merupakan gambaran adanya perubahan pola struktur dalam idiomatik Sunda. Karena idiom itu merupakan produk folklor, yang intensitas penyebarannya relatif lebih banyak secara lisan (dari mulut ke mulut), maka wajar bila implikasi dari setiap produk lisan timbulnya perubahan. Karena sifatnya lisan, ada beberapa kemungkinan, kalau tidak bertambah, ya pasti berkurang ataupun berubah bentuk. Itulah kenyataannya yang merefleksikan kemandirian (arbitrer) suatu bahasa. .

Idiom atau ungkapan simbolik, pada hakekatnya merupakan kekayaan batiniah yang dapat menggambarkan citarasa dan kehalusan budi warga masyarakat pendukungnya. Modus komunikasinya memang tidak terus terang, tetapi jelas dan komunikatif. Padanan babasan Sunda *Ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*, yakni “*Enak di Elu, nggak enak di Gua*”

Keheranan pembaca yang kedua, mungkin timbul pertanyaan, lho apa hubungannya antara idiom itu dengan kondisi wakil rakyat kita di dewan? Bertolak dari perspektif idiomatik, tulisan ini akan mencoba memotret bagaimana perilaku mereka saat ini.

Ungkapan “*ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*” sebenarnya merupakan pernyataan yang berselubung kegelapan, namun terang benderang menggambarkan kinerja wakil rakyat begitu buruk di mata rakyat sekarang ini. Ungkapan itu berangkat dari ketidakpercayaan berdasarkan pengalaman empirik yang berulang dan disimpulkan atas suatu kinerja atau penilaian akan suatu prestasi atau nilai-nilai tertentu yang tidak meyakinkan. Oleh karena itu, boleh jadi *Eon* merupakan representasi anggota legislatif kita, dan *Ehe* adalah sosok yang mewakili seluruh rakyat yang kini sedang terpuruk. Karena dalam paradigma “*ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*”, para anggota legislatif sepertinya tak punya waktu berpikir tentang rakyat yang diwakilinya. Mereka laiknya tidak punya mata, hati dan telinga sehingga tidak mampu mendengar dan merasakan keluh kesah rakyatnya.

## Potret Wakil Rakyat Kita

Lembaga perwakilan rakyat sejatinya adalah etalase intelektualitas dan moralitas. Mutu representasi mereka sangat tergantung bagaimana kedua faktor ini bekerja dan dipertahankan.

Lalu bagaimana sebenarnya tipe wajah wakil rakyat kita di dewan itu? Menurut Neal Reimer (1967) yang dikutip Ichlasul Amal (1996), ada empat tipe perwakilan, yakni *trustee*, *delegate*, *partisan* dan *politico*.

Tipe *trustee* adalah tipe wakil rakyat yang mampu mengetahui, merumuskan, dan mengaktualisasikan dengan baik apa-apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat (konstituen) yang memilihnya. Ketika terjadi tarik ulur antara kepentingan bangsa dan konstituennya, mereka biasanya lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Sedangkan kebalikannya adalah tipe *delegate*. Cirinya mereka (wakil rakyat) lebih mengutamakan kepentingan konstituen daripada kepentingan bangsa secara umum. Tipe ketiga adalah *partisan*, cirinya adalah wakil rakyat yang disamping terikat pada partai, juga merasa terikat lagi pada ideologi yang dianutnya. Hal ini tercermin terutama dari partai yang mencakup aneka ideologi (pluralis). Dan yang terakhir merupakan tipe hasil gabungan antara semua tipe sebelumnya ditambah keterikatan pada hati nurani. Pada tipe *politico* ini wakil rakyat selalu bertindak atas dasar pertimbangan hati nurani, masyarakat pemilih dan sekaligus partai.

Nah, kira-kira pada tipe manakah posisinya wakil rakyat kita? Bertolak dari pendapat Reiner itu kita bisa melihat dengan jujur, anggota dewan kita sekarang, ternyata mayoritas tampaknya (masih) memegang teguh tipe *delegate* atau bahkan *partisan*. Artinya, mereka masih dominan berpegang (*nyekel deleg*) pada semangat kolektivitas bahkan individualistis dalam setiap gerakannya.

Lho, apa buktinya? Coba saja simak bagaimana sepak terjang wakil kita di dewan, yang notabene hasil dari pemilihan yang demokratis pada Pemilu 2004. Segenap rakyat gegap gempita memilihnya dengan penuh kesadaran sehingga mendudukan para wakil itu di kursi empuk. Tapi, manakala mereka sudah duduk, coba tanyakan, mana bukti yang pernah dijanjikannya dalam kampanye dahulu? Buktinya, mereka secara nyata dan sadar justru melupakan rakyat yang diwakilinya. Malah mereka sibuk memperjuangkan kenaikan gaji, berbagai fasilitas lainnya, seperti fasilitas mesin cuci, tunjangan telepon, jatah naik haji, jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan yang paling memalukan, adanya isu bahwa mereka menjadi calo bantuan bencana alam. Jadi, semua kepentingan rakyat yang pernah dijanjikannya itu hanya *omdo* (omong doang). Cuma isapan jempol belaka.

Melihat kenyataan itu, maka sangat pantas dan wajar bila rakyat geram. Sebagian rakyat putus asa atau frustrasi. Alih-alih anggota parlemen yang mereka pilih seharusnya mampu menjadi agen bagi kepentingan politik rakyat, malah jadi agen kapitalis yang anti rakyat atau agen penguasa yang menganaktirikan rakyat. Kinerja mereka bukan hanya tidak adil dan tidak bermoral, tetapi juga melumpuhkan vitalitas energi yang menjadi syarat utama kerja keras masyarakat untuk mencapai kemajuan. Praktik kapitalis (kaum materialistik) ini pada dasarnya merupakan gejala jalan pintas untuk meraih sebanyak-banyaknya terobosan keuntungan melalui *anomali* kejujuran dan keadilan.

Hilangnya harapan rakyat (karena terlalu tinggi menggantungkan kepada wakil rakyat), resikonya memang harus ditebus dengan kekecewaan yang amat sangat. Rasanya belum juga kering bibir kita, membicarakan bagaimana ulah para anggota legislatif kita yang lalu-lalu. Mendadak sontak kita dikejutkan lagi oleh berita yang dilansir oleh berbagai media baru-baru ini, yang menyatakan bahwa gaji mereka bakal naik tahun ini. Padahal beberapa bulan yang lalu (ketika pemerintah mau menaikkan BBM) kocek-kocek mereka sudah begitu tebal karena kenaikan gaji yang mencengangkan itu. Rakyat pun ramai meributkannya. Namun, seperti biasa rakyat itu melupakannya. Pantas saja Otto Sumarwoto *keukeuh* pada pandangannya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang *pelupa* yang nantinya berakibat pada sifat lain yang sama buruknya yakni *kagetan* (Kompas, 26/02/06).

Konon khabarnya, pendapatan (*take home pay*) per bulan anggota legislatif tahun ini, untuk Ketua DPR akan menerima Rp89,238 juta dari tahun yang lalu sebesar Rp 73, 767 juta. Sementara itu, para wakil ketua menerima Rp 75,184 juta dari sebelumnya Rp 61,548 juta dan para anggota biasa menerima Rp 49,411 juta dari sebelumnya Rp 36,810 juta. *Haik, ruaaaaar biasa, Ne!*

Bagi mereka, peduli amat, rakyat kelaparan dan orang miskin yang hampir mencapai 60 juta. Persetan dengan rakyat yang antri uang kompensasi (BLT), sehingga banyak yang pingsan, klenger, semaput, sampai-sampai di Kudus ada orang yang mati tanpa ditanggapi. *Kuma karep* dengan minimnya upah para buruh. Mereka menutup mata dengan gaji para guru, PNS dan pra prajurit TNI yang tinggal di barak-barak dengan gaji yang pas-pasan. Melihat kenyataan, inilah yang dimaksud oleh filsuf James Rachel sebagai *egoisme-etis*. Apa mau dikata, *egoisme-etis* memang mengajarkan seseorang untuk mengatakan, "kita tidak mempunyai kewajiban moral, selain melulu menjalankan apa yang paling baik bagi diri kita sendiri."

Jawaban-jawaban peduli amat, persetan, *kuma karep* adalah representasi dari *egoisme-etis* itu. Mereka cenderung lebih senang memikirkan diri sendiri karena orang lain juga tak ada yang peduli. Toh orang lain juga asyik memikirkan diri sendiri. Lalu kenapa (kita) mesti susah-susah untuk peduli kepada yang lain? Begitulah kira-kira jalan pikiran "*ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*" itu.

### **Godaan Kekuasaan**

Menurut Imam Ghazali, puncak kenikmatan dan kemewahan dunia pada dasarnya bertumpu pada dua faktor yakni: kekayaan dan kekuasaan. Dengan memiliki keduanya, seseorang dapat dengan mudah mencapai tujuan dan segala hal yang diinginkannya. Maka tidak heran bila keduanya memiliki daya tarik tinggi dan selalu diperebutkan.

Di antara kedua faktor itu, menurut Ghazali, ternyata pangkat dan kekuasaan jauh lebih menggoda dibanding harta dan kekayaan. Karena kekuasaan memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak terdapat dalam kekayaan, terutama yang menyangkut tiga hal. *Pertama*, kekuasaan itu menjadi alat (wasilah) untuk memperoleh dan menumpuk kekayaan. Hakekatnya yang memiliki kekuasaan ia telah memiliki kekayaan. Namun tidak demikian dengan sebaliknya, yang memiliki kekayaan tidak serta merta memiliki kekuasaan. *Kedua*, kekuasaan melahirkan pengaruh yang luas dan relatif lebih langgeng dari harta. *Ketiga*, dapat menaikkan *pamor* dan mendongkrak popularitas seseorang.

Pantas saja 'libido' orang untuk menjadi anggota dewan itu memang sangat luar biasa, dan dilakukan dengan segala cara. Bila mereka terpilih jadi "anggota dewan terhormat" tidak saja bisa membuat lompatan status sosial, tetapi juga melambungkan status ekonomi.

Jadi omong kosong, bila *nawaetu* mereka karena ingin memperbaiki nasib rakyat. Alih-alih yang pasti memperbaiki nasib sendiri. Rakyat baru disebut namanya dan dilirik manakala menjelang hajatan politik lima tahunan. Saat itu, para petualang politik pasti bergemuruh mengumbar janji dengan suguhan 'surga telinga' yang akan memperjuangkan 'nasib rakyat'.

Namun jangan-jangan rencana menaikkan gaji para anggota legislatif ini sebenarnya skenario atau "*pitapak*" pemerintah untuk 'menaklukan' DPR dalam rangka mencari legitimasi untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL), seperti halnya kenaikan BBM bulan Oktober tahun lalu?

Memang dalam menyikapi fenomena ini, ada juga beberapa anggota yang secara terang-terangan menentang dan bersikeras menolak rencana kenaikan gaji itu. Namun, lagi-lagi seperti kata sebuah iklan mobil, "nyaris tak terdengar." Itulah modusnya dan kitapun sudah hafal betul.

Bila saja anggota dewan tetap ngotot dengan rencana kenaikan gajinya, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Itu mempertegas sebuah pengkhianatan moralitas mereka yang luar biasa. Mereka tidak punya rasa malu. Mereka sebenarnya Eon yang sedang "ngabodor" main *dodombaan* dan selamanya ingin menang sendiri. Dengan terang-terangan mereka mempraktikkan *egoisme-etis* yang selalu ingin untung sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Wallahu A'lam. Cag!

Dosen *Kajian Budaya* pada Jurusan Pendidikan Bahasa Sunda, FPBS UPI, dan alumnus (S2) Sosiologi-Antropologi UNPAD.